

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ketersediaan fasilitas pendidikan SD, SLTP, dan SLTA di Kecamatan Lubuk Alung dengan jumlah penduduk pendukung setelah dibandingkan antara jumlah eksisting dengan standar SNI-1711-2004 ketersediaannya tidak tercukupi. Keterjangkauan layanan fasilitas pendidikan dari hasil analisis *buffering* menunjukkan terjangkau dan tidak terjangkaunya fasilitas pendidikan dengan jarak jangkauan ideal secara garis lurus dari titik fasilitas. Hampir seluruh fasilitas pendidikan formal (SD, SLTP dan SLTA) tidak terjangkau oleh perumahan penduduk. Sedangkan keterjangkauan layanan fasilitas pendidikan dari hasil *network analysis* menunjukkan terjangkau dan tidak terjangkaunya fasilitas pendidikan dengan jarak jangkauan ideal melalui jaringan jalan dari titik fasilitas. Hasil analisis ini juga menunjukkan fasilitas pendidikan formal (SD, SLTP dan SLTA) tidak terjangkau oleh perumahan penduduk lebih mendominasi dari total keseluruhan nagari di Kecamatan Lubuk Alung.

Secara keseluruhan jarak antar fasilitas pendidikan formal (SD,SLTP dan SLTA) tidak ideal dan kepadatan penduduk rendah sesuai standar SNI-1711-2004 di Kecamatan Lubuk Alung. Penambahan fasilitas disebabkan kebutuhan tidak tercukupi dan tingkat keterjangkauan tidak terjangkau. Rencana penambahan diletakkan di permukiman yang padat tapi belum terlayani fasilitas pendidikan. Sedangkan, pemindahan fasilitas disebabkan kebutuhan yang tercukupi namun tingkat keterjangkauan tidak terjangkau. Selain itu, penambahan dan pemindahan fasilitas juga dipertimbangkan jarak ideal antar fasilitas pendidikan, kepadatan penduduk rumah terlayani dan lokasi penataan fasilitas pendidikan sesuai teori *neighborhood unit*, serta fasilitas pendidikan lainnya baik didalam maupun diluar sekitar Kecamatan Lubuk Alung sehingga mampu melayani beberapa perumahan.

Pada fasilitas pendidikan SD diperlukan penambahan fasilitas sebanyak 6 unit yang tersebar, 1 unit di Nagari Aie Tajun, 3 unit di Nagari Lubuk Alung, dan 2 unit di Nagari Sungai Abang serta terjadi pemindahan fasilitas di setiap nagarinya karena jarak fasilitas yang terlalu berdekatan. Pada fasilitas pendidikan SLTP diperlukan penambahan fasilitas sebanyak 3 unit yang tersebar, 1 unit di Nagari Aie

Tajun, 1 unit di Nagari Lubuk Alung, dan 1 Unit di Nagari Pasie Laweh serta terjadi pemindahan fasilitas di setiap nagarinya karena jarak fasilitas yang terlalu berdekatan. Pada fasilitas pendidikan SLTA diperlukan penambahan fasilitas sebanyak 5 unit yang tersebar, 2 unit di Nagari Lubuk Alung, 2 unit di Nagari Pasie Laweh, dan 1 unit di Nagari Aie Tajun serta terjadi pemindahan fasilitas di setiap nagarinya karena jarak fasilitas yang terlalu berdekatan.

## **5.2 Saran atau Rekomendasi**

Berikut merupakan beberapa saran atau rekomendasi yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu :

1. Dalam merencanakan pengembangan penyelenggaraan pendidikan disarankan setiap daerah mempertimbangkan dari berbagai faktor seperti jumlah penduduk usia sekolah, jumlah penduduk pendukung, jumlah perumahan terlayani dan sebagainya agar mendapatkan porsi fasilitas pendidikan yang merata sesuai wilayahnya.
2. Sebagai pihak yang berkepentingan, pemerintah kecamatan dan kabupaten dapat mempengaruhi ketersediaan fasilitas pendidikan yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan untuk memberikan hak yang sama bagi semua orang di wilayahnya.
3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut yang membahas tentang prinsip-prinsip konsep *neighborhood unit* ketika mengukur cakupan pelayanan fasilitas lain seperti Puskesmas, Tempat Ibadah dll.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Astuti. S. I., Arso S. P., dan Wigati P. A., Anal. (2015). *Standar Pelayanan Minimal Pada Instal. Rawat Jalan di RSUD Kota Semarang, Jurnal Infotekmesin vol. 3, pp. 103–111.*
- Baihaqi. M.K., Andri. S., Hana. S.F. (2019). *Analisis Aksesibilitas Shelter Brt Terhadap Smp Dan Sma Negeri Di Kota Semarang Berbasis Sistem Informasi Geografis. Jurnal Geodesi UNDIP vol 8 (4). 143-153*
- Bashit. N. Susanti. S. Zulfaidah. A. Abdul. S. (2020). *Pelatihan Penggunaan Software Quantumgis Untuk Peningkatan Kualitas Data Geospasial Desa Karanganyar. Jurnal Pasopati vol 2 (3). 150-157.*
- DeChiara, J., & Koppelman, L. (1975). *Manual of Housing-planning and Design Criteria:(by) Joseph Dechiara and Lee Koppelman.* Prentice-Hall.
- Ervita, A. (2011). *Studi tingkat efektivitas pelayanan fasilitas pendidikan sebagai salah satu indikator mewujudkan kota layak anak (Studi Kasus di Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta).*
- Firdaus, Atikah Rifda. (2021). *Tingkat Keterjangkauan Pelayanan Fasilitas Pendidikan di Kawasan Permukiman Kota Bangkinang.*
- Iskandar. (2009). *Evaluasi Sebaran Lokasi Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di Kota Bogor.* Institut Teknologi Bandung., Wahyu Gia. 2011. *Perencanaan Fasilitas Pendidikan Kawasan Perkotaan. Jurnal Ilmu Administrasi 8(3). 340-353.*
- Janfa, Rino Darma. (2021). *Jangkauan Pelayanan Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Limapuluh Berdasarkan Konsep Neighborhood Unit.*
- Ratna, Nyoman Kutha. (2011). *Penelitian Sastra: Teori, Metode, dan Teknik.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rohe, M.H. Gates, L. (1986). *Planning with Neighborhoods.* Chapel Hill: University Of North Carolina.
- Salsabilah. I., Fanita. C.A., Nuryantiningsih. P., Firman. A. (2023). *Pemodelan Network Analysis Terhadap Keterjangkauan Fasilitas Puskesmas Kota Malang. Jurnal Solma vol 12 (2). 522-535.*
- Soefaat, (1997). *Kamus Tata Ruang edisi 1.* Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum.
- Sujarto, Djoko. (1976). *Pemekaran Kota atau Dekonsentrasi Planologies: Tinjauan Mengenai Hubungan Permukiman Desa-Kota.* Prisma : Jakarta
- Suryanto, (1994). *“Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan Dalam Pengembangan Wilayah Strategis”.* Forum Perencanaan Pembangunan.vol. II, No. 1, Juni, hal. 63-88.

Uliantoro, Wahyu Gia. 2011. Perencanaan Fasilitas Pendidikan Kawasan Perkotaan. *Jurnal Ilmu Administrasi* 8(3). 340-353.

### **Peraturan dan Kebijakan**

Republik Indonesia. 2004. SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional*. Jakarta

### **Dokumen**

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman. 2011. *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030*, BAPELITBANGDA Kabupaten Padang Pariaman, Padang Pariaman.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman. 2023. *Data Agregat Kependudukan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023*, BPS Kabupaten Padang Pariaman, Padang Pariaman.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. 2023. *Kecamatan Lubuk Alung Dalam Angka Tahun 2023*, DUKCAPIL Kabupaten Padang Pariaman, Padang Pariaman.

Dirjen Cipta Karya Bekerjasama Dengan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia. 1998. *Kamus Tata Ruang*. Jakarta : Dirjen Cipta Karya.

### **Modul**

Esri. (2022). *Modul Vector Geospatial Science*. Jakarta Selatan: Esri Indonesia.

Sahar. Musnanda. (2020). *Modul Penggunaan GIS*. Jakarta: The Nature Conservancy.